

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)



Oleh :
DEKI PUTRA
05296/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

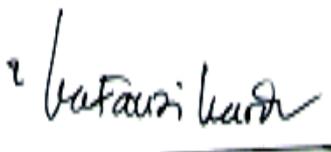
PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH *(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*

Oleh :
DEKI PUTRA
05296/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013
dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, ... Februari 2013

Pembimbing I



Eka Fauzhardhani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)

Deki Putra

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : dekiputra22@gmail.com

This research examine the effect of Public accountability and Budget goal clarity on SKPD managerial performance. The population on this research were SKPD at Padang City, and sample was determined based on judgement sampling method with 135 respondents. Primary data were used in this research, collected with a direct survey using questionnaire that sent to Top and Middle manager at every selected SKPD in the region of Padang. Multiple regression analysis are used as analysis method with using *Statistical Package For Social Science* (SPSS) as the tools.

This research proves that 1) Public accountability significant positive impact on SKPD managerial performance (H_1 accepted), 2) Budget goal clarity significant positive impact on SKPD managerial performance (H_2 accepted).

From this research we can suggest that: 1) For all unit of government in Padang region to increase the implementation of public accountability and budget goal clarity. It will give a good impact on managerial performances at the SKPD. 2) For future research, it is better to use a direct interview method to the respondent. So that the answer collected from the respondent are more clearly. 3) For future researcher, it is better to add the other related variable.

Keywords: Public accountability, Budget goal clarity, Manajerial performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD, dan 2) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metode *judgment sampling*, dengan jumlah responden 135. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Pimpinan dan Kepala Bagian pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD (H_1 diterima), 2) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD (H_2 diterima).

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Dari hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh instansi pemerintah Kota Padang agar dapat meningkatkan penerapan akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran yang nantinya akan meningkatkan kinerja manajerial SKPD itu sendiri, 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya, 3) Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama sebaiknya menambahkan dan menggunakan variabel lain.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralik partisipatoris (Mardiasmo, 2006).

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Mahoney *et. al.* (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).

Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkisenambungan dengan proses penganggaran. Kenis (1979) dalam Andarias (2009) mengatakan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam Syafril, 2009).

Adapun fenomena yang terjadi saat ini, berdasarkan pemantauan dari Wakil Walikota Padang terkait realisasi keuangan lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pasar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Pol PP dan Disperindagtamben. Kinerja dari kelima SKPD ini belum maksimal dikarenakan realisasi keuangan belum mencapai target, maksudnya belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga. Keadaan ini juga membuktikan bahwa kinerja manajerial SKPD kota Padang khususnya kelima SKPD di atas belum bisa bekerja sesuai dengan harapan. "Pimpinan SKPD haruslah orang yang cakap dan memiliki kapabilitas. Tanpa itu, kinerja SKPD akan buruk. Baik buruknya kinerja suatu SKPD, tergantung dari gaya kepemimpinan dari pimpinan. SKPD tersebut," (www.padangekspres.co.id)

Adapun penelitian yang dilakukan Citra (2010) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan sedangkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang.

Andarias (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana

berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2008) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dengan motivasi sebagai variabel intervening.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian ini terletak pada waktu, tempat serta variabel independen yang digunakan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andarias, yang menguji tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Bedanya adalah pada waktu penelitian Andarias melakukan penelitian pada tahun 2007, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012. Andarias melakukan penelitian pada pemerintah kabupaten Deliserdang, sedangkan penelitian ini dilakukan pada SKPD kota Padang,

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memahami tentang pengaruh akuntabilitas public terhadap kinerja manajerial SKPD, menambah pengetahuan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan yang berkaitan dengan kinerja manajerial SKPD dan juga dapat memberikan mamfaat sebagai masukanbagi pemerintah dalam memaksimalkan kinerja manajerial SKPD serta dapat dijadikan refrensi yang bagi

peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kinerja jika dilihat dari bahasa artinya adalah *performance* yang berarti prestasi. Jadi kinerja merupakan prestasi kerja seorang pegawai. Menurut Mahsun (2006), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut Mahoney *et. al* (1963) dalam Natalia (2010) kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator :

1. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Perencanaan bertujuan untuk memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran dan program kerja sehingga terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
4. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan

untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.

5. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menagani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.
6. Pemilihan Staff, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya.
7. Negoisasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
8. Perwakilan, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain.

Menurut Wayan (1997) dalam Septi (2010), kinerja pemerintah daerah dapat dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi tersebut, atau dapat pula disimpulkan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu tingkatan sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil atau mencapai tujuan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002). Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk

pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab adan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*).

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Lingkup Akuntabilitas Publik

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993)

dalam Mardiasmo (2001). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran merupakan kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan, yang

menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan, penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu dan akhirnya tahap pengawasan (Gunawan, 2003).

Menurut Dedi (2008), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*).

Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.

Kenis (1979) dalam Syafril (2009) mengatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Locke dan Lathan (1984) dalam Samuel (2008) menyatakan bahwa sasaran adalah apa yang hendak dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.

Menurut Steers dan Porter (1976) dalam Samuel (2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

1. Sasaran harus spesifik bukan samar-samar.
2. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.

3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.

4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.

5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.

6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.

7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

Keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Fakhri (2011) menguji Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan Citra (2010) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang dan ransparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang.

Andarias (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2008) tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dengan motivasi sebagai variabel intervening.

Helni (2011) telah melakukan penelitian tentang pengaruh *strategic vision*, transparansi, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Syafriani (2009) tentang pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa variabel independen yaitu ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Akuntabilitas Publik dengan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya

akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting, baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik (Deddi, 2010).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah yang dilihat dalam laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauhmana pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Deddi (2010), pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja, untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja. Hal ini menegaskan

dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah.

b. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya.

Kenis (1979) dalam Syafril (2009) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran

yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya sasaran anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini masing-masing SKPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kerangka Konseptual

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja atau prestasi kerja aparat pemerintah daerah suatu organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu Akuntabilitas publik merupakan salah satu pendekatan umum dapat meningkatkan kinerja. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Sedangkan kejelasan sasaran anggaran pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstada) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda). Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang

disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Untuk lebih jelasnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

H₂: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat (Umar, 2005). Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan serta memperlihatkan pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel independen dengan kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai variabel dependennya.

Populasi, Sampel Dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera barat. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*. *Judgement sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Dimana yang menjadi sampel dalam penelitaian ini adalah seluruh SKPD yang ada di kota Padang yang terdiri dari 45 SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan SKPD dan 2

orang kepala bagian pada masing-masing SKPD, sehingga responden berjumlah 135 orang.

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek (*Self-Report data*). Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli (tidak melalui media perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner tertutup. Kuesioner disebarkan secara langsung ke responden, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (*dependent variabel*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi

ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.

2. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah:

- a. Akuntabilitas Publik (X_1)
- b. Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS), yang digunakan untuk mengukur variabel independen, sedangkan untuk variabel dependen adalah kuesioner (*self rating*) yang dikembangkan oleh Mahoney *et. al* (1963). Setiap responden diminta untuk mengukur sendiri kinerjanya dengan memilih dan/atau menuliskan skala antara 1-9. Skala 1-3 mewakili kinerja di bawah rata-rata, skala 4-6 mewakili kinerja rata-rata dan skala 7-9 mewakili kinerja di atas rata-rata. Menurut Sugiyono (2008) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Variabel-variabel yang diukur dalam kuisisioner mencakup: 1) Akuntabilitas Publik, 2) Kejelasan Sasaran Anggaran. Kuisisioner terdiri dari sejumlah pertanyaan tertutup yang

menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan *Corrected Product Moment*.

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. *Pilot test* akan dilakukan pada mahasiswa akuntansi FE UNP Konsentrasi sektor publik.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α).

Sekaran (2003) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach Alpha's* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b. 0,6-0,7 akseptabel
- c. 0,7-0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Jika semakin dekat koefisien alpha pada nilai berarti butir pertanyaan dalam koefisien ini semakin reliabel.

Hasil Uji Coba Instrumen

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Anggaran dan Audit Kinerja

Manajemen dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Dimana r_{tabel} untuk $n = 30 - 2 = 28$ adalah 0.306. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Model Analisis

Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y \text{ (KMSKPD)} = a + b_1 AP + b_2 KJS + e$$

(Ghozali, 2006:85)

Dimana:

Y = Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

e = *error term*

AP = Akuntabilitas Publik

KJS = Kejelasan Sasaran Anggaran

Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas residual untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. Jika nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.

b. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF) < 10* dan *tolerance > 0.1*.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Konsep heterokedastisitas atau homokedastisitas didasarkan pada penyebaran varians variabel dependen diantara rentang nilai variabel independen. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Apabila $sig \geq 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Model (*Goodness Fit of Model*)

1) Uji F (F-test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selain itu, uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika $p \text{ value} < (\alpha) = 0,05$ dan $f_{hitung} > f_{tabel}$, berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau $(\alpha) = 5\%$ (0.05).

2) Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* berarti *R Square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *Adjusted R Square*. nilai

koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

3) Uji Hipotesis (*t-Test*)

Uji *t* bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai *t* hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) = 0.05 (5%). Dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika tingkat signifikansi $< \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1,2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_1 dan H_2 .
- b) Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima Hipotesis.
- c) Jika tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

Definisi Operasional

1. Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hasil dari proses aktivitas manajerial sektor publik yang efektif dalam melaksanakan kegiatan manajerial mulai dari proses perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan, dan kinerja secara keseluruhan.

2. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik atas kinerja yang telah

dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 45 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari Dinas, Kantor, Badan, dan inspektorat daerah. Sampel pada penelitian ini yaitu Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Kepala bagian keuangan dan Kepala bagian perencanaan yang ada pada setiap SKPD di lingkungan Pemko Padang, sehingga jumlah responden adalah 135 responden.

Dari kuesioner yang dibagikan ada 5 SKPD yang menolak diberikan kuesioner sehingga kuesioner yang disebar sebanyak 40 SKPD atau sebanyak 120 responden. SKPD yang menolak diberikan kuesioner yaitu: 1) Sekretaris Daerah, 2) Dinas Pendidikan, 3) Dinas Kesehatan, 4) Kantor Kecamatan Kuranji dan 5) Rumah Sakit Umum Daerah. Dinas-dinas dan kantor ini menolak memberikan kuesioner karena alasan kesibukan. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah sebanyak 103 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap .

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 103$ adalah 0,1630. Berdasarkan hasil pengolahan didapatkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing variabel X_1 , X_2 , dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Tabel

Dari tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen kinerja manajerial SKPD diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,842, untuk instrumen akuntabilitas publik nilai terkecil 0,393 dan untuk instrumen kejelasan sasaran anggaran nilai terkecil 0,519.

2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Nilai reabilitas dinyatakan *reliable* jika mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument yang dikatakan valid lebih besar dari 0,6. Berikut ini merupakan tabel nilai *cronbach's alpha* masing-masing instrumen:

Tabel

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu untuk instrumen variabel kinerja manajerial SKPD 0,972. Untuk instrumen variabel akuntabilitas publik 0,827 dan untuk instrumen variabel kejelasan sasaran anggaran 0,862. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,8. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One*

Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel

Dari Tabel terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,977 dengan signifikan 0,296. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

2. Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikoleniaritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikoleniaritas.

Tabel

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel 17 di atas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikoleniaritas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini

membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Data

1. Uji F (*F-test*)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan, atau dengan membandingkan nilai sig. yang didapat dengan derajat signifikansi $\alpha = 0,05$. Apabila nilai sig. lebih kecil dari derajat signifikansi maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah *fix*).

Tabel

Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai $F = 24,262$ dan signifikan pada level 0,000. Sedangkan nilai F_{tabel} yaitu 3,09. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $24.262 > 3,09$ dan $\text{sig. } 0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*. Berarti, model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat atau mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel

Berdasarkan Tabel 20 di atas, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,313.

Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran adalah sebesar 31,3% sedangkan 68,7% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

3. Model Analisis

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model ini terdiri dari dua variabel bebas yaitu akuntabilitas publik (X_1), kejelasan sasaran anggaran (X_2) dan satu variabel terikat yaitu Kinerja Manajerial SKPD (Y).

Tabel

Berdasarkan Tabel 21 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$Y = -82,553 + 2,449 X_1 + 1,340 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Kinerja Manajerial SKPD
- X_1 = Akuntabilitas Publik
- X_2 =Kejelasan Sasaran Anggaran
- e = Standar error

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar -82,553 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran adalah nol maka nilai kinerja manajerial SKPD adalah sebesar konstanta -82,553.
- b. Koefisien akuntabilitas publik sebesar 2,449 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas publik sebesar satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 2,449 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 1,340 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kejelasan sasaran anggaran satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kinerja manajerial SKPD sebesar 1,340 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Uji Hipotesis (*t-test*)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang dihasilkan dengan alpha 0,05 atau dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berdasarkan tabel, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Hasil analisis dari tabel, pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,6602. Untuk variabel akuntabilitas publik (X_1) nilai t_{hitung} adalah 5,211 dan nilai sig adalah 0,000. Selanjutnya untuk melihat apakah arahnya positif atau negatif dilihat dari koefisien β , pada tabel koefisien β positif sebesar 2,449. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $5,211 > 1,6602$ dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.

2) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Hasil analisis dari tabel 21, pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada $\alpha = 0,05$ adalah 1,6602. Untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X_2) nilai t_{hitung} adalah 2,028 dan nilai sig adalah 0,045. Selanjutnya untuk melihat apakah arahnya positif atau negatif dilihat dari koefisien β , pada tabel koefisien β positif sebesar 1,340. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,028 > 1,6602$ dan nilai signifikansi $0,045 < \alpha$ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD, sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ dan nilai t_{hitung} $5,211 > t_{tabel}$ 1,6602. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 2,449. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik setiap manajer pada semua tingkatan pada SKPD akan meningkatkan kinerja manajerial.

Hal ini sesuai dengan dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002) yaitu akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakih (2011), yang meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas publik, berpengaruh positif signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Penelitian yang dilakukan Citra (2010) yang meneliti pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas dan transparansi kebijakan

publik terhadap kinerja manajerial pada SKPD Dinas se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas se-Kota Semarang.

Jadi, kinerja manajerial diharapkan dapat meningkat dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap tingkatan manajer pada semua tingkatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hal ini juga diharapkan dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal.

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD dengan nilai signifikansi $0,045 < \alpha = 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,028 > t_{tabel} 1,6602$. Nilai koefisiensi β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 1,340. Pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD adalah bahwa anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Kenis (1979) dalam Syafrial (2009) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Dengan demikian karakteristik sasaran anggaran dapat berimplikasi pada kinerja aparat

pemerintah daerah yang berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai kebijakan umum APBD.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan Syafrial (2009) tentang pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarias (2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD, pada penelitian ini menggunakan variabel permoderasi yaitu pengawasan internal.

Jadi secara keseluruhan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran mengacu pada anggaran yang telah dibuat dan dapat dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya berdampak baik terhadap kinerja atau aktivitas manajerial dari aparat itu sendiri. Fakta yang ditemukan dilapangan menunjukkan hubungan yang sesuai satu sama lain dimana dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka aparat dapat menentukan target dalam mencapai anggaran tersebut, dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah ditargetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik.

Agar anggaran itu jelas penggunaannya serta mempunyai manfaat bagi publik dan aparat pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran, maka aparat pemerintah daerah dari semua tingkatan level manajer harus selalu bekerja secara efisien dan efektif karena dibatasi oleh waktu dan

target anggaran yang telah direncanakan pada awalnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 31,30%. Sedangkan 68,70% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja manajerial SKPD.
2. Penyebaran kuesioner pada beberapa SKPD masih memiliki kendala dalam prosedur perizinan dan pengisian kuesioner. Hal tersebut menyebabkan data yang diolah kurang optimal, untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden yang dituju dapat melakukan pengisian kuesioner yang disebarkan.
3. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuesioner akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya (subjektif) dan akan

berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran dalam pemerintahan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah kota padang telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada rendahnya kinerja manajerial SKPD. Pemerintah daerah terutama SKPD kota padang sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai penerapan akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran agar kinerja manajerial SKPD dapat terus ditingkatkan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
3. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan dan menggunakan variabel lain, karena dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan dapat menjelaskan sebesar 31,30%. Sedangkan 68,70% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Andarias Bangun. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara

- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen Buku 2*. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala. Jakarta: Salemba Empat
- Deddi Noerdiawan, dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- _____ 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Ehrman Suhartono. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. SNA 9 Padang. Yogyakarta
- Febby, Rahmadani. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Universitas Negeri Padang
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HS Ginting. 2010. Pengaruh Patisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi.2007.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. \Yogyakarta:Unit penerbit dan percetakan ilmu manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus.2006.Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA
- Mardiasmo.2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- _____ 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- _____ 2006. *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press
- Natalia, Dewinda Putri. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Pabundu Tika. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafrial. 2009. Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- _____. Lima Kepala SKPD Terancam Digeser. Metropolis. Melalui [www.padangekspres.co.id]. Sabtu, 21/05/2011 12:46 WIB

7.	Negosiasi Saya berperan dalam melakukan kontrak untuk barang/jasa yang dibutuhkan pada unit/sub unit saya dengan pihak luar.								
8.	Perwakilan Saya berperan dalam mewakili organisasi saya untuk berhubungan dengan pihak lain diluar organisasi.								
9.	Kinerja secara menyeluruh Saya mengevaluasi kinerja, dan sasaran kinerja secara menyeluruh.								

2. AKUNTABILITAS PUBLIK

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-Ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.					
2.	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.					
3.	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output maksimal.					
4.	Program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik.					
5.	Pelaksanaan program-program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.					
6.	Anggaran yang diusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan.					
7.	Pengalokasian dana anggaran mengikuti proses-proses dan prosedur yang berlaku.					
8.	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.					
9.	Audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku.					

3. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RR = Ragu-Ragu

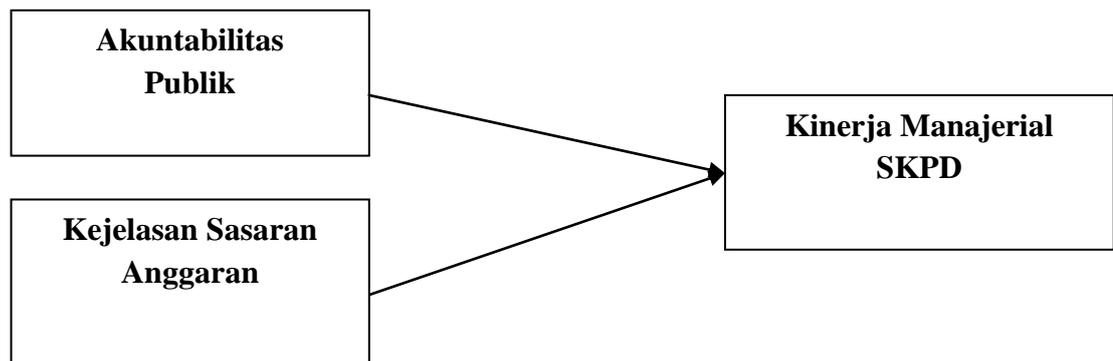
TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya memahami persis apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan saya.					
2.	Saya memahami bagaimana kinerja saya diukur.					
3.	Saya memiliki sasaran yang jelas yang membantu saya dalam melakukan pekerjaan.					
4.	Saya mempunyai batas waktu untuk mencapai sasaran pekerjaan.					

5.	Jika saya mempunyai lebih dari satu sasaran untuk dicapai, saya mengetahui mana yang paling penting dan yang kurang penting.					
6.	Sasaran dalam pekerjaan saya cukup menantang, tetapi layak (tidak terlalu mudah maupun sulit).					
7.	Dalam instansi ini, tim bekerja sama untuk mencapai sasaran.					

Gambar 1
Kerangka Konseptual



UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
DATA PENELITIAN

1. Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.972	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KM1	48.10	249.324	.915	.966
KM2	47.45	262.269	.845	.970
KM3	47.61	257.593	.863	.969
KM4	47.72	253.694	.897	.967
KM5	48.03	246.519	.869	.968
KM6	48.38	243.963	.868	.969
KM7	48.43	245.620	.842	.970
KM8	48.17	240.989	.903	.967
KM9	47.96	239.744	.925	.966

2. Akuntabilitas Publik

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.827	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
AP1	34.71	9.699	.393	.826
AP2	34.87	8.582	.598	.801
AP3	34.81	8.864	.624	.798
AP4	34.75	9.073	.571	.804
AP5	34.84	9.074	.565	.805
AP6	34.63	9.627	.507	.812
AP7	34.61	9.573	.574	.806
AP8	34.48	9.801	.488	.814
AP9	34.53	9.820	.478	.815

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.862	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KSA1	25.78	4.999	.697	.833
KSA2	25.89	5.096	.686	.835
KSA3	25.91	5.100	.695	.834
KSA4	25.98	4.980	.644	.842
KSA5	25.92	5.386	.627	.844
KSA6	26.09	5.669	.572	.852
KSA7	25.88	5.437	.519	.859

A. Statistik Deskriptif Data

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	103	10	80	53.98	17.716
AP	103	30	45	39.03	3.403
KSA	103	26	35	30.24	2.640
Valid N (listwise)	103				

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	14.53644454
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.047
	Negative	-.096
Kolmogorov-Smirnov Z		.977
Asymp. Sig. (2-tailed)		.296

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-82.553	20.908		-3.948	.000		
	AP	2.449	.470	.470	5.211	.000	.826	1.211
	KSA	1.340	.661	.183	2.028	.045	.826	1.211

a. Dependent Variable: KM

3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42.298	12.744		3.319	.001
	AP	-.261	.287	-.097	-.910	.365
	KSA	-.683	.403	-.181	-1.696	.093

a. Dependent Variable: AbsUt

C. Hasil Analisis

1. Uji F (*F-Test*)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0458.523	2	5229.261	24.262	.000 ^a
	Residual	1553.438	100	215.534		
	Total	2011.961	102			

a. Predictors: (Constant), KSA, AP

b. Dependent Variable: KM

2. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 ^a	.327	.313	14.681

a. Predictors: (Constant), KSA, AP

b. Dependent Variable: KM

3. Koefisien Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-82.553	20.908		-3.948	.000
	AP	2.449	.470	.470	5.211	.000
	KSA	1.340	.661	.183	2.028	.045

a. Dependent Variable: KM